

**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang merupakan amanat konstitusional Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) yaitu Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kepala Daerah juga wajib menyampaikan Ringkasan LPPD kepada Masyarakat dan masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD tersebut sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini merupakan tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup urusan konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dengan tujuan meningkatkan citra dan wibawa pemerintahan daerah.

Ringkasan LPPD Tahun 2020 memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial), hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan Inovasi Daerah.

Melalui Penyampaian Ringkasan LPPD Tahun 2020 ini diharapkan diperoleh masukan dan saran dalam rangka mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Dekonsentrasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/6931/OTDA Tanggal 18 Desember 2020 hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur 16.732.065 Ha. terdiri dari daratan seluas 12.638.931 Ha dan perairan darat seluas 95.761 Ha, terletak antara 113° 35' 31" - 119° 12' 48" Bujur Timur dan 2° 34' 23" Lintang Utara - 2° 44' 17" Lintang Selatan.

Segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (Tujuh) Kabupaten yaitu Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu (DOB) serta memiliki 3 (tiga) Kota yaitu Balikpapan, Bontang, dan Samarinda.

Kalimantan Timur termasuk provinsi yang tidak padat penduduk, karena populasi penduduk Kalimantan Timur hingga data terakhir semester kedua tahun 2020 berjumlah 3.769.073 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk Kalimantan Timur yang dihitung berdasarkan Komposisi rasio jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki sebanyak 52% atau 1.955.542 Jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 48% atau 1.813.531 Jiwa.

II. CAPAIAN KINERJA MAKRO

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	76,61	76,24	-0,37
2.	Angka Kemiskinan	5,94	6,64	0,7
3.	Angka Pengangguran	5,94	6,87	0,93
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,74	-2,85	-7,62
5.	Pendapatan (PDRB) Perkapita (juta rupiah)	175,25	160,11	-15,14
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,330	0,335	0,005

1. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, selama periode 2010-2019 pembangunan manusia provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan dengan peningkatan Rata-rata setiap tahun sebesar 0,80 persen. Pada tahun 2010, IPM Kalimantan Timur sebesar 71,31 dan terus meningkat setiap tahunnya sehingga menjadi sebesar 76,61 di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 IPM Kalimantan Timur mengalami penurunan sebesar 0,48 persen, menjadi sebesar 76,24. Hingga tahun 2020, pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur masih berstatus "tinggi", sama dengan 21 provinsi lain di Indonesia.

2. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2020 sebesar 243,99 ribu (6,64 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada



Maret 2020 sebesar 230,26 ribu (6,10 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah sebanyak 13,73 orang dan secara persentase bertambah sebesar 0,54 persen.

3. Angka Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur pada Agustus 2020 mencapai 1.817.680 orang, bertambah sebanyak 17.239 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2019 (1.800.441 orang). Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 mencapai 1.692.796 orang, berkurang sebanyak 685 orang dibanding keadaan pada Agustus 2019 (1.693.481 orang).

4. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kalimantan Timur pada Tahun 2020 mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang tumbuh sebesar 4,74 persen. Hal ini disebabkan oleh kinerja sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif. Kontraksi terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,59 persen, lalu Lapangan Usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,32 persen, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,58 persen, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 3,97 persen, dan disusul Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 3,07 persen. Sementara itu, sektor yang mampu tumbuh positif yang tertinggi adalah Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 19,67 persen, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 11,59 persen, dan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 6,96 persen.

5. Pendapatan perkapita

Badan Pusat Statistik sudah tidak merilis data pendapatan perkapita dikarenakan perubahan tahun dasar dan metode perhitungan dalam penyusunan produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB Per Kapita Harga Berlaku Tahun 2020 sebesar 160,11 juta rupiah sedangkan pada tahun 2019 sebesar 175,25 juta rupiah dengan penurunan 8,63 persen. Pengeluaran perkapita provinsi Kalimantan timur tahun 2020 pada komponen indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 11,73 juta sedangkan pada tahun 2019 pengeluaran perkapita sebesar 12,36 juta, terjadi penurunan sebesar 5,11 persen.

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 mengalami penurunan 0,003 poin dibanding dengan Maret 2020 yaitu dari 0,333 pada Maret 2020 menjadi 0,330 pada bulan September 2020. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2020 tercatat nilainya sama dengan Maret 2020, yaitu sebesar 0,286.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan yang lazim dipakai adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Semakin tinggi persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.



III. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan wajib pemerintahan berdasarkan pelayanan dasar sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Urusan Pendidikan

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2020 capaian kinerja 97,04 %.
2. Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus pada tahun 2020 capaian kinerja 81,75 %.

b. Urusan Kesehatan

1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan per 1000 penduduk pada tahun 2020 capaian kinerja 1,61 %.
2. Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi pada tahun 2020 capaian kinerja 40,74 %
3. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana pada tahun 2020 tidak terjadi bencana Provinsi.
4. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi pada tahun 2020 capaian kinerja 97,87 %.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir pada tahun 2020 dengan capaian kinerja 23,65%.
2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi pada tahun 2020 dengan capaian kinerja 29,41%.
3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2020 dengan capaian kinerja 49,84%.
4. Rasio kemantapan jalan pada tahun 2020 dengan capaian kinerja 69,77%.
5. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli pada tahun 2020 dengan capaian kinerja 17,85%.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Persentasi Luas kawasan kumuh 10 s.d 15 Ha yang ditangani dengan capaian kinerja 63,81%.
2. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU dengan capaian kinerja 100%.

s. Urusan Trantibumlinmas

1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian kinerja 100%.
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan capaian kinerja 63,64%.
3. Persentase penanganan pra bencana Tahun 2020 dengan capaian kinerja 10% kegiatan pembentukan 1 (satu) Desa Tangguh Bencana (Destana).
4. Persentase penanganan tanggap darurat bencana dengan capaian kinerja 100%.

v. Urusan Sosial

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dengan capaian kinerja 49,25%
2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dengan capaian kinerja 33,14%.



3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dengan capaian kinerja 37%.
4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi dengan capaian kinerja 95,14%.

IV. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 memperoleh skor 3,0885 dengan status kinerja *Sangat Tinggi*.

V. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut pada periode tahun 2014-2019.

VI. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH

Target Pendapatan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebesar Rp. 8.584.526.835.525,18,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.132.934.637.527,40,- capaian realisasi sebesar 118,04 %. Adapun rincian pendapatan antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar Rp. 4.318.906.394.875,18,- dan realisasi sebesar Rp. 5.289.069.824.750,41,- capaian realisasi 122,46 %.
2. Dana Perimbangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.192.349.479.650,- dan realisasi sebesar Rp. 4.759.526.731.777,- capaian realisasi 113,53 %.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan anggaran sebesar Rp. 73.270.961.000,- dan realisasi sebesar Rp. 84.338.081.000,- capaian realisasi 115,10 %.

Total Belanja pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebesar Rp. 10.706.850.002.651,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.328.251.817.708,25,- capaian realisasi sebesar 87,12 %. Adapun rincian Belanja antara lain :

1. Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 6.171.964.627.233,82,- dan realisasi sebesar Rp. 5.482.008.130.715,33,- capaian realisasi 88,82 %.
2. Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 4.534.885.375.417,18,- dan realisasi sebesar Rp. 3.846.243.686.992,92,- capaian realisasi 84,81 %

Data tersebut diatas merupakan masih bersifat sementara karena proses audit Badan Pemeriksa Keuangan masih berlangsung.

VII. INOVASI DAERAH

1. Ojek Online Bersama Lindungi Anak (OJOL BERLIAN) Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020.
2. Layanan Pengantaran Buku (GO-BOOK)
3. Layanan Perpustakaan Setiap Saat (LAPAR SESAAT)
4. Cetak Online Di Rumah (CONDI) Simpator
5. APLIKASI E-OFFICE
6. E-Library Bappeda Provinsi Kaltim (Perpustakaan Digital)



7. SECEPAT MOBIL Sistem Informasi Cepat Untuk Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Berbasis Mobile App (Smartphone)
8. e-SHRULAH (Elektronik Survey BedAH RUmah LAYak Huni)
9. SI BUNDA OELIT ONLINE (Sistem Informasi Perkebunan Dalam Pelayanan Informasi Publik Interaktif Secara Online)
10. Si Bunda Pegel Dalam Kelambu (Sistem Informasi Perkebunan Awal Pencegahan Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran di Lahan Kebun)
11. Radio Siaga Bencana
12. PERAN PESTISIDA NABATI MATCUHOL DALAM MENUNDUKUNG PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN
13. Sistem Pelayanan Elektronik Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPARKLING).
14. Bincang-Bincang Seputar Anak Berkebutuhan Khusus (BIS KOTA) RSUD. AWS Samarinda
15. Sistem Pendaftaran Online "NdekJerih" Poliklinik Spesialis RSUD. AWS Samarinda
16. SAKURA (Sahabat Pasien Dan Keluarga Yang Ramah)
17. SARI RASA BIJES (Sampah Rumah Sakit Sebagai Sarana Pembiayaan BPJS)
18. PON-RSKD (Pendaftaran on-line RSKD)
19. LAUNDRY CERIA RSKD
20. UTD-RSKD (Unit Tranfusi Daerah)
21. Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala
22. Ujian Dinas Berbasis Komputer
23. Aplikasi SIM-HP
24. LC BPSDM (Learning Center Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur)
25. TIM LEARNING (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur)
26. Pemanfaatan E-Learning pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
27. Keterampilan Lansia Budi Daya Ikan dan Tanaman (Kelas Budiman)
28. Klinik Peluk Kasih Lanjut Usia (Peka Lansia)
29. Penerimaan Lansia Terlantar On Line (PLT on-line)
30. Dokumentasi dan Informasi Hukum
31. Sinergitas Informasi Masyarakat (SI INFORMAN)
32. Sistem Informasi Rekomendasi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Handal dan Informatif (SIMENAWAN HATI).

VIII. PENUTUP

Pada kesempatan yang baik ini, Saya atas nama Gubernur Kalimantan Timur memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Kepada Bupati/Walikota beserta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, yang telah bekerjasama didalam mensinkronisasikan visi, misi dan program/kegiatan pembangunannya serta melaksanakannya dengan baik dan



- benar sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota.
2. Kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai dan untuk itu agar terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat serta melaksanakan tupoksinya dengan kerja keras, jujur, dan ikhlas semata-mata untuk kepentingan masyarakat.
 3. Kepada seluruh stake holders dan publik, atas partisipasi dan dukungannya didalam menciptakan situasi dan kondisi Kalimantan Timur yang aman dan damai sehingga pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Termasuk atas masukan dan kritikan yang membangun atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan selama ini.

InsyAllah dengan membangun kebersamaan, kekompakan dan sinergitas bersama, maka dapat kita wujudkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Island of Integrity yang penyelenggaraan Pemerintahannya terus meningkatkan kinerja dan prestasinya yang terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta penyelenggaraan Pembangunannya, hasilnya dapat merata, adil dan mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur. Perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Provinsi Kalimantan Timur dapat kita wujudkan bersama.

Mengakhiri RLPPD ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sehingga situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Samarinda, Maret 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

